

Memperbandingkan pelaksanaan hak narapidana tentang remisi di lembaga pemasyarakatan militer Cimahi dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan Paledang Bogor ditinjau dari istem peradilan pidana

Teguh Pribady, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=136422&lokasi=lokal>

Abstrak

Pemberian remisi kepada narapidana baik narapidana sipil maupun militer merupakan perintah dari undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sipil dan Lembaga Pemasyarakatan Militer dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan melalui wawancara akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Pelaksanaan pemberian remisi untuk narapidana sipil melibatkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Sedangkan untuk narapidana militer pemberian remisi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga pemasyarakatan Militer setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat Pemasyarakatan Militer (PUSMASMIL) yang juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pelaksanaan pemberian remisi khususnya narapidana militer, disamping adanya tindakan indisipliner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional suatu peraturan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pemberian hak remisi di LP klas IIA Paledang Bogor sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong tidak tercapainya dalam pelaksanaan pemberian remisi. Dari penelitian lapangan Masmil Cimahi dalam pelaksanaan pemberian remisi terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi yaitu belum adanya peraturan secara khusus dan tegas sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan hak-hak narapidana militer perihal pelaksanaan remisi.

<hr>The administration of remission to prisoners civil or millitary is order of the law as a stimulation so that imprisonment are ready to receive the counseling to change the behavior according to goal of community system. The research is done to know the administration of remission to prisoners civil an related with the goal of community system. The nature of this research in normative yuridic. The materials of library and study of documents and completing data. The data gathered will be interpreted systematic logically. The result shows that implementation of remission administration is a right of prisoners and also as

stimulation so that prisoners are ready to receive the counseling to change the behavior according to the goal of Community System. The Implementation of remission for civil prisoners involves Unit of Technique Implementor of Community, Regional Office of Law Department and Human Right to be continued to Directorate General of Community, also involving the controlling Judge and observer. For the implementation of remission for military prisoners involves Unit of Technique Implementor of Community to be continued to Directorate General of Community after release from General Community Military (PUSMASMIL), also involves the controlling Judge and observer. The problem found in administration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implementation as law umbrella to be supporting of base for operational the remission juridical and structural foundation as supporting of base for operational requirement especially for the implementation of military remission administration, beside there is disciplinary action of prisoner, so that it is attempted to implement as maximum as possible the statutes and operational implementation rule of remission administration especially found in the law of Community. From the field research is found that remission administration in LP Klas IIA Paledang Bogor is right, but there is few problem that can be reached for implementation of remission administration. From the field research in military prisoners Community (Masmil Cimahi) the implementation of remission that there is found problem of remission administration. The problem found in administration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implementation as law umbrella to be supporting of base for operational the remission juridical and structural foundation as supporting of base for operational requirement especially for the implementation of military remission administration.